

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab V ini akan berisi pemaparan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

5.1 Simpulan

Setelah penelitian selesai, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari kedua objek yang dibandingkan. Pertama, adalah perbedaan asal muasal krisis, lalu perbedaan cara penanganan krisis, dan dampak yang ditimbulkan krisis terhadap masing-masing negara.

Sebelum terjadi krisis, Korea Selatan dan Indonesia sama sama mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal itu dapat terlihat dari tingkat pertumbuhan PDB per kapita yang dinilai sangat fenomenal, di mana Korea Selatan dan Indonesia mengalami peningkatan PDB per kapita lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 1975. Selain itu, tahun 1990-1996 juga terdapat pertumbuhan investasi yang cukup besar. Ditambah bergabungnya Korea Selatan dengan OECD atau *Organization for Economic Cooperation and Development*, sehingga persentuhannya dengan keuangan asing semakin sering. Munculah keadaan di mana bank-bank meminjam uang valuta asing dari bank asing melalui pinjaman jangka pendek lalu dipinjamkan lagi pada perusahaan di Korea

Selatan untuk pinjaman jangka panjang. Hal ini bertujuan agar perusahaan di Korea Selatan tidak kehabisan modal untuk memproduksi barang-barangnya. Tentu saja hal ini akan menjadi masalah ketika bank-bank asing yang meminjamkan uang pada bank-bank di Korea Selatan meminta kembali uangnya, karena bank Korea harus membayarnya dengan valuta asing yang nilainya pun fluktuatif.

Di Indonesia, beberapa ekonom menganggap pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai indikator adanya kemungkinan akan terjadi kondisi perekonomian yang *overheating* yang akan menuntun pada terjadinya krisis, meskipun ekonom lainnya banyak juga yang berpendapat sebaliknya. Di antara indikator yang memungkinkan untuk terjadi krisis adalah inflasi yang cenderung menurun, tetapi neraca pembayaran mengalami defisit transaksi karena ekspor jauh lebih sedikit daripada impor. Harga aset pun meningkat pesat. Indonesia dinilai belum mampu menghadapi kecepatan proses integrasi ekonomi ke dalam perekonomian global, dilihat dari belum memadainya pembangunan infrastruktur ekonomi dan sistem kelembagaan yang belum tertata dengan baik, sehingga mengakibatkan Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal.

Krisis pun menghadang kedua negara ini. Penyelesaiannya cukup berbeda, karena kondisi dan struktur perekonomian yang berbeda di kedua negara. Korea Selatan dan Indonesia sama-sama memanggil IMF saat terjadi krisis, dan mendapatkan pinjaman uang dalam bentuk

US Dollar untuk menangani kurs lokal yang mengambang bebas. Kebijakan suku bunga tinggi pun dilaksanakan di Korea, meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Korea Selatan memutuskan untuk memutuskan bantuan dari IMF pada tahun 1998, sesaat setelah terpilihnya presiden baru, yaitu Kim Dae Jung. Kim akhirnya mencanangkan program-program ekonominya sendiri, di antaranya adalah kebijakan suku bunga rendah dan penggunaan dana publik untuk menyelamatkan lembaga keuangan serta rehabilitasi bank.

Keberanian memutuskan bantuan IMF ini didukung oleh adanya chaebol dalam struktur perekonomian Korea Selatan. Chaebol adalah sekelompok orang yang memiliki kekayaan dalam perusahaan, biasanya adalah keluarga pemilik perusahaan besar. Restrukturisasi korporasi atau restrukturisasi chaebol memberikan dampak positif pada efektifitas chaebol dalam meningkatkan perekonomian negara. Chaebol secara rutin mengekspor beberapa komoditas yang berharga, seperti semikonduktor, mobil, kapal, dan mesin.

Sebaliknya, Indonesia terus berhutang pada IMF dalam rangka menutupi kurs yang terus melemah. Sepertinya IMF menilai Indonesia tidak kredibel Korea Selatan, sehingga pemberian dana bantuan dilakukan secara bertahap, tidak seperti di Korea Selatan yang dana bantuannya diberikan secara langsung di awal program. Pencairan dana dilakukan setelah Indonesia terbukti telah melaksanakan program-program yang dianjurkan oleh IMF, seperti kebijakan suku bunga tinggi

dan penutupan 16 bank yang dinilai tidak layak lagi dipertahankan. Anehnya, setiap Indonesia melaporkan perkembangan program dan mendapatkan dana bantuan selanjutnya, Indonesia juga harus mengangsur utangnya dan kadang pembayaran angsuran lebih besar daripada pemberian dana utangan selanjutnya. Hal ini mulai terjadi di awal 2001. Contohnya pada triwulan 3 tahun 2001, Indonesia mendapatkan pencairan dana utangan sebesar 397 juta US Dolar, namun mengangsur utang sebesar 463 juta US Dollar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Indonesia belum mampu keluar dari ketergantungannya dengan IMF, karena meskipun sudah bisa mengangsur kembali, Indonesia tidak memutuskan bantuan dari IMF. Ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki kepercayaan diri seperti Korea Selatan, dan tidak didukung oleh struktur perekonomian yang secara optimal mampu membantu Indonesia meningkatkan perekonomian tanpa bantuan IMF.

Kondisi di Indonesia diperparah dengan respon masyarakatnya yang tidak mau tahu mengenai upaya pemerintah menghadapi krisis. Saat mengetahui krisis telah terjadi, masyarakat malah berbondong-bondong mengambil uang mereka dari bank sehingga terjadilah *bank rush*. Masyarakat juga mengambinghitamkan Bank Indonesia, dengan mengatakan bahwa krisis ini bermula dari Bank Indonesia. Sebaliknya, masyarakat Korea Selatan sangat *mensupport* negara dalam menyelesaikan krisis, dengan membantu mengumpulkan harta pribadi berupa emas. Emas itu dikumpulkan, lalu dilebur dan dicetak menjadi

emas batangan, dijual dan uangnya digunakan untuk membayar utang pada IMF.

Krisis di Indonesia memicu pada krisis politik dan krisis sosial ekonomi, dengan puncaknya adalah Peristiwa Trisakti yang terjadi tanggal 12 Mei 1998. Penembakan 4 mahasiswa saat sedang aksi protes memicu kerusuhan dan kondisi politik yang semakin panas, yang akhirnya mengakhiri rezim Soeharto. Kursi presiden pun berganti-ganti sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak stabil.

Keadaan sedikit membaik ketika pemerintahan digantikan oleh B.J. Habibie, di mana kurs rupiah menguat dan inflasi menurun. Tetapi ketika Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid, keadaan ekonomi semakin memburuk. Ditambah hubungan Abdurrahman Wahid yang kurang harmonis dengan elemen-elemen negara seperti DPR dan MPR, membuat penyelesaian krisis ekonomi di Indonesia semakin molor. Program-program yang dianjurkan oleh IMF pun banyak yang tertunda pelaksanaannya dan menggantung selama kurang lebih 1 tahun.

Dari sini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sosok pemimpin pun merupakan hal yang krusial dalam penyelesaian krisis. Krisis ekonomi di Indonesia telah membawa krisis politik, dan krisis politik ini diwarnai oleh tokoh-tokoh yang memiliki kepribadian yang berbeda. Habibie adalah sosok pemimpin yang cukup baik kala itu, karena berhasil sedikit menstabilkan perekonomian Indonesia dengan kepemimpinannya. Kekurangan yang dia miliki mungkin ada pada opini

masyarakat yang menganggap Habibie adalah perpanjangan tangan Soeharto, atau tangan kanan Soeharto, sehingga rakyat tidak bisa menyukai dan mendukungnya sepenuhnya. Belum lagi masalah lepasnya Timor-Timor yang menjadi alasan utama bagi pihak yang kurang menyukai Habibie.

Sementara itu, krisis di Korea Selatan ternyata membuat kualitas pendidikan semakin tinggi. Para pelajar dan orangtua di Korea Selatan menyadari betul bahwa pendidikan bisa menjadi oase di padang pasir, menjadi salah satu solusi penyelesaian krisis, dan menjadi investasi jangka panjang bagi negara. Pendidikan di masa krisis sangat diutamakan, peningkatan sumber daya manusia dimaksimalkan, ditunjang dengan program *Brain Korea 21st Project* yang merupakan program pembaruan pendidikan milik pemerintah. Dampaknya, para investor asing dapat melihat bahwa Korea Selatan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan akhirnya investor tersebut bersedia menanamkan modalnya lagi di Korea Selatan. Tentu hal ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyelesaian krisis di Korea Selatan.

5.2 Rekomendasi

Peneliti berharap penelitian yang berjudul “Penyelesaian Krisis Ekonomi 1997-2001 di Korea Selatan dan Indonesia : Sebuah Perbandingan” ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan, perguruan tinggi, khususnya bagi Departemen Pendidikan Sejarah,

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk dijadikan sumber tambahan penelitian atau bahan bacaan dalam rangka menambah wawasan mengenai sejarah kawasan Asia, khususnya Korea Selatan dan Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan pembaca umum mengenai sejarah kawasan Asia, karena sangat banyak hal menarik dan penuh dengan nilai yang dapat digali dari setiap sudut sejarah di seluruh dunia. Penelitian ini juga bisa dijadikan sumber pembelajaran sejarah wajib di Sekolah Menengah Atas jenjang kelas XII, karena sesuai dengan K.D. 3.6 yang berbunyi “menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi”. Penelitian juga menyinggung mengenai pendidikan di Indonesia pada masa reformasi, sehingga dapat pula dijadikan sumber pembelajaran bagi K.D. 3.9 yaitu “mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan sejak proklamasi sampai dengan reformasi”.

Peneliti menemukan masih banyak hal menarik yang dapat ditelusuri dari peristiwa krisis ekonomi 1997 di Korea Selatan dan Indonesia, dan ini mungkin bisa menjadi rekomendasi jika ada pihak yang sedang mencari kajian untuk diteliti. Salah satunya adalah mengenai restrukturisasi Chaebol di Korea Selatan pada masa krisis 1997 dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Korea Selatan masa

kini. Peneliti belum menemukan penelitian yang sangat mendalam mengenai hal ini, kebanyakan hanya dijelaskan sekilas dan menjadi sub bab dalam penelitian saja. Padahal restrukturisasi chaebol adalah salah satu faktor keberhasilan Korea Selatan, sehingga sangat menarik dan memiliki banyak nilai guna jika ada pihak yang ingin menelitinya.

Rekomendasi selanjutnya dari peneliti adalah harus ada perbaikan pendidikan di Indonesia. Peneliti memaparkan di bab sebelumnya bahwa Indonesia dan masyarakatnya mengalami fenomena moral hazard yang cukup mengancam kepribadian bangsa. Moral hazard ini bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan, tetapi harus dilakukan sesuatu agar moral hazard dan sikap bangsa Indonesia yang oportunisme itu bisa hilang. Berbagai cara mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah, mungkin dengan perbaikan melalui pendidikan karakter yang lebih menekankan pada pembangunan karakter dibanding dengan pendidikan yang berorientasi pada nilai. Karena berdasarkan data dan fakta yang ditemukan peneliti, pendidikan di suatu negara berpengaruh banyak pada kualitas sumber daya manusianya.